

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dalam satu dekade terakhir telah mentransformasikan cara kerja birokrasi pemerintah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Digitalisasi administrasi pemerintahan menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam reformasi birokrasi nasional. Dalam konteks ini, pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi salah satu area strategis yang paling terdampak oleh transformasi digital. Penerapan sistem informasi pengadaan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian internal yang mendorong efisiensi, akurasi data, dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Namun demikian, banyak studi menyoroti bahwa digitalisasi saja belum menjamin peningkatan kinerja apabila tidak diikuti dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) untuk mengoperasikan dan memanfaatkan sistem tersebut secara optimal. Dengan kata lain, keberhasilan transformasi digital dalam pengadaan sangat bergantung pada sinergi antara *administrasi sistem informasi* dengan *kompetensi pegawai* yang menjalankannya.

Meskipun berbagai instansi pemerintah telah menerapkan sistem informasi pengadaan, kesenjangan antara adopsi teknologi dan peningkatan kinerja pegawai masih menjadi persoalan mendasar. Sejumlah penelitian terdahulu berfokus pada pengaruh sistem informasi terhadap efisiensi proses atau transparansi anggaran,

namun belum banyak yang menyoroti dimensi kompetensi individu pengguna sistem sebagai variabel yang turut menentukan efektivitas implementasinya, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang canggih tidak akan optimal tanpa dukungan pegawai yang memiliki kompetensi teknis, manajerial, serta pemahaman regulasi pengadaan yang memadai. Di sisi lain, studi yang mengkaji hubungan simultan antara administrasi sistem informasi dan kompetensi pegawai terhadap kinerja dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan daerah seperti di Kantor Bupati Labuhanbatu masih sangat terbatas. Hal ini membuka ruang penelitian baru untuk memahami bagaimana kedua faktor ini saling berinteraksi dalam memengaruhi kinerja birokrasi daerah.

Secara empiris, Kantor Bupati Labuhanbatu telah berupaya mengimplementasikan sistem informasi berbasis digital dalam proses pengadaan barang dan jasa guna mempercepat alur administrasi serta meningkatkan akurasi dan transparansi pelaporan. Namun, observasi awal menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif masih ditemui kendala seperti keterlambatan input data, kesalahan administrasi, dan rendahnya kemampuan adaptasi sebagian pegawai terhadap perubahan teknologi. Situasi ini menandakan adanya kesenjangan antara potensi sistem digital yang tersedia dengan kemampuan SDM yang mengoperasikannya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara komprehensif menganalisis pengaruh administrasi sistem informasi dan kompetensi pegawai terhadap kinerja dalam pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian ini tidak hanya diharapkan dapat memperkuat landasan

teoretis hubungan antara digitalisasi administrasi dan kompetensi SDM, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan peningkatan kapasitas pegawai guna mendukung pengadaan yang lebih efektif, efisien, dan berintegritas.

SDM menjadi hal yang utama dalam setiap kegiatan perusahaan, dimana semua tindakan yang diambil setiap kegiatan usaha ditentukan oleh manusia yang jadi karyawan perusahaan (Affandy, 2024).

Melalui potensi yang dimiliki manusia, perusahaan dapat mencapai kesuksesan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rendahnya kualitas SDM merupakan penghalang pembangunan ekonomi suatu bangsa. Persoalan ini semakin rumit sehubungan dengan masuknya era globalisasi dimana masyarakat dunia saling terhubung dalam berbagai aspek kehidupan yang juga menimbulkan dampak tingkat persaingan yang semakin tinggi. Perusahaan akan berkembang dan mampu bertahan dalam lingkungan persaingan yang kompetitif apabila didukung oleh pegawai yang berkompetensi di bidangnya (Sumarmi, 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, faktor pertama yang dapat meningkatkan kinerja pegawai yaitu kompetensi. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengalaman serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerja (Noch, 2025).

Kemampuan pegawai bukan hanya keterampilan teknis yang diperlukan untuk proses pengadaan, mereka juga harus memiliki kemampuan manajemen, memahami peraturan, dan berinteraksi dengan orang lain secara baik. Hal ini

penting karena pengadaan barang dan jasa di sektor publik sering melibatkan berbagai pihak, seperti penyedia barang dan jasa, pengguna anggaran, dan masyarakat luas (Gumilang et al., 2024).

Maka untuk mengatasi masalah yang dihadapi perlu adanya rancangan sebuah sistem informasi permintaan barang dan jasa yang diharapkan dengan sistem tersebut pengolahan data dapat di proses lebih cepat dan terkontrol. Dengan demikian setiap satker dapat mengajukan surat pengajuan barang dengan mengakses web pengadaan barang/jasa secara online (Hilman et al., 2023).

Administrasi sistem informasi dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Bupati Labuhanbatu menjadi indikator penting dalam mendukung kinerja pegawai. Apalagi di era perkembangan teknologi informasi saat ini, bagian-bagian pekerjaan tersebut banyak berkaitan dengan pemanfaatan sistem dan teknologi informasi sebagai alat bantu untuk menuntaskan pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai. Perkembangan teknologi informasi dalam hal ini dapat menunjang pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi modern, baik instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta yang memungkinkan pekerjaan dapat diselesaikan secara tepat, akurat dan efisien (Nazlia Damaa, Hais Damab & a, b, 2025).

Secara umum, efektivitas administrasi sistem informasi berpengaruh langsung terhadap kelancaran proses pengadaan. Apabila sistem berjalan optimal, maka risiko kesalahan prosedur, keterlambatan, dan ketidaksesuaian dokumen dapat diminimalkan. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan kualitas dan produktivitas kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Kinerja merupakan

suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya dimiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Selain itu, kompetensi pegawai menjadi indikator pendukung yang tidak kalah penting. Pegawai yang kompeten akan lebih mampu bekerja secara efektif, efisien, dan profesional sehingga kinerja dalam pengadaan barang dan jasa dapat tercapai secara optimal. Kompensasi adalah salah satu motivasi agar karyawan tetap menjaga kinerja dengan baik (Pratiwi, 2024).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka secara terperinci rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah administrasi sistem informasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Bupati Labuhanbatu?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Bupati Labuhanbatu?
3. Apakah administrasi sistem informasi dan kompetensi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Bupati Labuhanbatu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian yang dilakukan di Kantor Bupati Labuhanbatu ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh administrasi sistem informasi terhadap kinerja pegawai dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Bupati Labuhanbatu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Bupati Labuhanbatu.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh administrasi sistem informasi dan kompetensi secara simultan terhadap kinerja pegawai dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Bupati Labuhanbatu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan di Kantor Bupati Labuhanbatu ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu manajemen, khususnya di bidang manajemen sumber daya manusia dan sistem informasi.
 - b. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji topik serupa, berkaitan dengan pengaruh

administrasi sistem informasi dan kompetensi terhadap kinerja pegawai di sektor pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pemerintah (Kantor Bupati Labuhanbatu)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas administrasi sistem informasi serta kompetensi pegawai guna menunjang peningkatan kinerja dalam pengadaan barang dan jasa.

b. Bagi Pegawai

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya administrasi sistem informasi yang baik dan kompetensi yang memadai dalam mendukung kinerja yang optimal.

c. Bagi Peneliti

Sebagai syarat akademik dalam penyusunan skripsi untuk memenuhi salah satu kewajiban dalam menyelesaikan pendidikan di jenjang sarjana.